

# **Kepentingan Raja-Raja Kerajaan Islam Dalam Mobilisasi Dukungan Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat Tahun 2016**

*Mafa Uswanas<sup>φ</sup>*

## **ABSTRAK**

Kontestasi politik pasti tidak terlepas dari kelompok kepentingan yang mempunyai tujuan untuk diperjuangkan dalam proses demokrasi. Posisi kelompok yang diwakilkan oleh individu atau elite dalam sebuah kontestasi juga menjadi penentu, hal itu yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat 2016 dengan adanya para raja sebanyak 7 Kerajaan Islam sebagai elite adat yang memobilisasi dukungan untuk salah satu kandidat, dan kandidat yang mendapatkan dukungan tersebut memperoleh kemenangan suara yang cukup tinggi sehingga bisa memenangkan kontestasi. Fenomena keterlibatan para raja dari Kerajaan Islam sangatlah menarik untuk bisa dikupas tentang kepentingan apa yang bisa membuat kelompok para raja memberikan dukungan kepada satu kandidat. Dalam menganalisis ini, Teori Kelompok Kepentingan Gabriel Almond menjadi pisau analisis untuk mengupas kepentingan para raja dalam kontestasi karena para raja ini merupakan kelompok yang berperan dalam menjaga adat dan kebudayaan masyarakat.

**Kata Kunci:** Kelompok Kepentingan, Kerajaan Islam, Mobilisasi dan Pilkada Kabupaten Fak-Fak 2016

## **ABSTRACT**

*Political contestation must be inseparable from interest groups that have a purpose to fight for in the democratic process. The position of the group represented by individuals or elites in a contestation is also a determinant, that is what happened in the election of the head of the Fak-fak Regency of West Papua Province 2016 with the presence of kings as indigenous elites 7 kings who mobilized support for one candidate, and candidates who received the support won a high enough victory so that it could win the contest. The phenomenon of the involvement of kings from the Islamic Kingdom is very interesting to be able to explore about what interests can make the group of kings provide support to one candidate. In analyzing this the theory of interest groups Gabriel Almond is a knife of analysis to explore the interests of the kings in contestation because these kings are groups that play a role in maintaining the customs and culture of society.*

**Keywords:** Interest Groups, The kingdom of Islam, Mobilization and 2016 Fak-Fak Regency Election

## **Pendahuluan**

---

<sup>φ</sup> Mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik, FISIP Universitas Airlangga Angkatan 2014  
[muswanas1996@gmail.com](mailto:muswanas1996@gmail.com)

Kabupaten Fak-fak merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat yang mempunyai kekayaan budaya dengan adanya Kerajaan Islam sebagai kekuatan kultural masyarakat. Beberapa Kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang berada di Wilayah Kabupaten Fak-Fak berjumlah 7 kerajaan Islam yang masih aktif dalam kegiatan masyarakat sehari-hari. Kebangkitan kesultanan ini tidak terlepas dari posisi kesultanan didalam pemerintahan hampir di seluruh daerah di Indonesia khususnya daerah yang hidup karena latar belakang kerajaan mempunyai harapan untuk ikut campur dalam konstetasi politik yang ada dan bahkan ada beberapa raja di daerah yang berada di Indonesia melangkah kaki untuk menjadi Gubernur, walikota dan Juga Bupati di masing-masing Daerah dan Provinsi.<sup>1</sup>

Kemenangan dalam sebuah mobilisasi oleh kelompok kepentingan merupakan sebuah keberhasilan apabila kandidat yang dukung memperoleh suara yang optimal. Seperti kemenangan Bupati terpilih Kabupaten Fak-Fak dalam pemilihan kepala daerah yaitu Mohamad Uswanas. Kemenangan yang diperoleh oleh kandidat ini juga tidak terlepas dari upaya para raja sebagai elit kultural adat dalam pemenangan untuk mobilisasi suara. Adanya campur tangan dukungan para raja ini juga disebabkan karena beberapa hal yang membuat mereka memberikan dukungan. Adanya keadaan Kabupaten Fak-Fak yang penduduknya mayoritas muslim merupakan salah satu pengaruh dalam proses Pilkada Fak-Fak harus munculnya kandidat yang beragama Islam dan mempunyai kedekatan hubungan darah dengan keluarga kerajaan. Para pemimpin Kristen dan muslim di Papua sadar bahwa agama adalah salah satu sumber inspirasi penting bagi rakyat dan lembaga-lembaga keagamaan, menjadi organisasi sipil yang paling besar dan paling terorganisir dengan baik di Papua seharusnya dapat memainkan peranan penting sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.<sup>2</sup> Adanya keinginan yang didorongkan oleh para elit kerajaan sebagai kelompok kepentingan membuat para kandidat yang berkontestasi mempunyai upaya cukup berat. Karena para raja sebagai elit adat mempunyai pengaruh yang kuat untuk melakukan sebuah mobilisasi masa agar mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu dengan adanya kesepakatan yang memilih satu kandidat dalam pemilihan Pilkada Fak-fak 2016 memang adanya kepentingan para raja yang tidak bisa diakomodir oleh kandidat lain untuk memperoleh dukungan dari para raja. Kondisi ini muncul bisa disebabkan karena dalam waktu yang cukup lama berbagai harapan dan keingi-

---

<sup>1</sup> Davidson, Jamie, Henley David. 2010. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal 45

<sup>2</sup> Nordholt Schulte N dan Klinken Gerry. 2009. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 610

nan komunitas lokal (etnis) terabaikan sebagai konsekuensi dari bangunan sistem politik dan pemerintahan yang sentralistik.<sup>3</sup> Didalam pemilihan Bupati Kabupaten Fak-Fak tahun 2016 terdapat komposisi 20 Kursi DPRD Kabupaten Fak-Fak diantaranya 20 Kursi tersebut Partai Golkar mendapat jumlah kursi terbanyak yaitu 4, Nasdem dan Demokrat hanya mendapatkan 3 Kursi, PKB, PAN dan Hanura mendapatkan 2 Kursi sedangkan PDIP, Gerindra dan PBB masing-masing mendapatkan 1 Kursi. Diantara 20 kursi DPRD Kabupaten Fak-Fak harus mengantongi 20% atau 4 kursi DPRD sebagai syarat untuk menjadi calon Kandidat Kepala Daerah.<sup>4</sup>

Sehingga dengan proses secara totalitas itulah yang membuat pasangan nomor urut 1 mendapatkan kemenangan, tentu ada beberapa hal kepentingan-kepentingan dari Raja-Raja agar bisa diakomodir. Terutama kepentingan untuk menghidupkan kembali eksistensi dari Kerajaan-Kerajaan Islam di Kabupaten Fak-Fak. Salah satu kepentingan itu juga muncul karena adanya romantisme kepemimpinan Kerajaan sebagai kekuatan tradisional serta lebih mempunyai kedekatan kepada masyarakat. Karena bagaimana pun tidak bisa dipungkiri bahwa peranan elite sebagai repressetasi kelompok harus juga diperjuangkan. Posisi elite sebagai representasi dari kelompok juga memang mempunyai beberapa peranan karena tanpa ada kepentingan bersama maka seorang elite akan kehilangan legitimasinya dimata masyarakat atau kelompok. Oleh karena itu dalam proses pemilihan kepala daerah para elite kerajaan harus bisa mengambil sikap atau keputusan untuk memberikan dukunga sebagai proses dalam memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Sehingga dalam mobilisasi yang menentukan adalah sebuah kepentingan yang berada diwilayah elit dan kelompok untuk menarik dukungan dalam pemenangan proses-proses Pilkada terutama di Kabupaten Fak-Fak 2016, dan kepentingan para raja inilah yang akan dikupas menggunakan teori kelompok kepentingan Almond dan apa saja kepentingan yang ada ditubuh para elite kerajaan Islam di Kabupaten Fak-Fak.

### **Kelompok Kepentingan**

Kerajaan islam yang berada di Kabupaten Fak-Fak ini berjumlah 7 Kerajaan Islam Dimana masing-masing kerajaan Islam ini mempunyai wilayah kekuassanya sendiri-sendiri. Ke Enam dari tujuh kerajaan ini sangat patuh oleh satu kerajaan yaitu Kerajaan (petuanan)

---

<sup>3</sup> Kristianus. 2016. "*Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat*", Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (1) (2016) 87-101

<sup>4</sup> Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

fatagar dimana kerajaan tersebut melahirkan 6 kerajaan di Fak-Fak. Kerajaan Fatagar sebagai kerajaan tertua di Kabupaten Fak-Fak mempunyai nilai tersendiri bagi Kerajaan-Kerajaan Islam yang lain di kawasan Raja Pertama Kerajaan Fatagar ini yang menerima mandat pertama tentang penyebaran Islam di Papua Barat Fak-Fak sebagai pintunya. Pertimbangan dan juga nasehat dari Raja Fatgar sangat diperhitungkan dan dijalankan. Gabriel Almond menjelaskan bahwa kelompok kepentingan atau *interest groups* suatu kerumunan orang yang didalamnya terdapat sosok-sosok mempunyai pengaruh proses pembuatan keputusan-keputusan yang bersifat politik dan juga ikut serta dalam proses-proses kebijakan dalam suatu negara dengan cara memakai mekanisme yang sangat demokratis. Indikator keberhasilan dari kelompok kepentingan atau *interest groups* ini jikalau keputusan politik yang dikeluarkan dari mereka diikuti dan dijalankan sesuai dengan saran dan perintah yang dikeluarkan. Kelompok kepentingan ini bisa bersifat apa saja bisa berasal dari Komunitas, Kelompok Budaya (etnik), Partai Politik, Organisasi masyarakat serta instansi pemerintahan dan juga non pemerintahan,

Adanya posisi para raja sebagai representasi Kerajaan Islam juga mempunyai pengaruh yang di wilayah kekuasaannya dimana tentu ada timbal balik yang diinginkan dalam proses mobilisasi untuk kepentingan memberikan arah dukungan kepada salah satu kandidat kepala daerah dalam Pilkada di wilayah Kabupaten Fak-Fak pada tahun 2016. Raja dari sebuah pemimpin kelompok budaya (etnis) dengan basis massa yang banyak yang terletak di masing-masing wilayah kekuasaan kerajaan dimana raja sebagai patron di dalam kelompok kepentingan yang bersifat etnis ini akan memutuskan arah dukungan pada konstetasi Pilkada Kabupaten Fak-Fak dengan harapan Kandidat yang telah diDukungan dan kemudian terpilih dapat menyelesaikan kontrak politik yang sudah disepakati sebelumnya.

Kelompok kepentingan memiliki bermacam macam gaya, struktur, sumber keuangan dan hal itu sangat memiliki pengaruh terhadap kehidupan politik, ekonomi dan budaya.<sup>5</sup> Adanya kemampuan kelompok untuk memobilisasi inilah yang membuat kekuatan Kerajaan Islam di Kabupaten Fak-Fak dipertimbangkan. Tentu terdapat beberapa faktor hal membuat sebuah kelompok-kelompok kepentingan yang efektif, salah satunya yakni dengan kemampuan kelompok kepentingan tersebut untuk memobilisasi dukungan, energi, dan sumber daya

---

<sup>5</sup> Almond, Gabriel. "Comparative Politics Today; A world view" *Interest and Articulation Interes Groups*. Hal 70

dan yang pasti hal tersebut merupakan faktor penting<sup>6</sup>. Begitu pula yang ada dalam proses pemenangan kandidat pasangan nomor urut 1 Mohammad Uswanas dan Abraham Sophaheluwaken yang didukung oleh elite kerajaan. Sehingga yang paling menarik dalam proses pemenangan tersebut adalah apa kepentingan para raja untuk memenangkan kandidat nomor urut 1 ini dalam proses pemilihan kepala daerah untuk diketahui sebagai wawasan politik dalam proses campur tangan elit daerah dalam pemenangan Pilkada 2016.

### **Pilkada: Menghidupkan Kembali Budaya Kerajaan Islam**

Budaya merupakan salah satu unsure kehidupan masyarakat Papua, begitu pula budaya dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ke-Islaman dalam kegiatan sehari-hari. Hal itu tentu memang tidak bisa terlepas dari adanya Kerajaan Islam yang ada di wilayah tersebut sebagai tali pengikat kekuasaan yang sudah terlebih dulu ada sebelum Negara ini merdeka. Tentu wilayah Kabupaten Fak-Fak yang mayoritas Islam tentu berbeda dengan wilayah lain di Provinsi Papua Barat yang mayoritas Nasrani. Oleh karena itu ketika Pemerintah Provinsi melakukan campur tangan melalui pembentukan lembaga adat yang didalamnya adalah individu yang ditunjuk oleh Provinsi untuk mengelola dan tidak melalui Kerajaan Islam yang ada membuat pandangan masyarakat adanya keinginan untuk melemahkan posisi Kerajaan Islam ditengah tengah masyarakat. Adanya pelemahan posisi Kerajaan Islam yang dilakukan oleh Provinsi melalui pembentukan lembaga adat ini yang tidak melibatkan orang-orang kerajaan membuat para raja sebagai elit kerajaan harus mengambil sikap agar posisi mereka tidak terancam. Karena bagaimana pun sebagai kelompok kepentingan yang sudah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat ketika adat budaya mereka akan dihilangkan melalui lembaga adat akan berdampak pada eksistensi budaya yang ada. Sehingga sikap yang diambil oleh raja Kerajaan Islam dalam mengambil peran pada pilkada yang diselenggarakan kabupaten Fak-Fak merupakan upaya perjuangan kelompok lokal ini atau Kerajaan Islam ini untuk mengembalikan lagi eksistensi mereka sebagai suatu kelompok. Adanya tekanan yang mengancam posisi pengaruh Kerajaan Islam ini sebagai simpul adat Islam di Kabupaten Fak-fak inilah yang membuat para raja memberikan sikapnya untuk mendukung pasangan nomor urut 1 Mohammad Uswanas dan Abraham Sophaheluwaken sebagai kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2016. Karena bagaimana pun kandidat pasangan nomor urut 1 tidak hanya representasi dari kelompok muslim tapi melainkan juga representasi dari keluarga Ke-

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal 75

rajaan Islam yang berasal dari Kerajaan Fatagar dengan marga Uswanas. Proses keikutsertaan para raja dalam proses mobilisasi juga disebabkan adanya kepemimpinan Bupati sebelumnya juga tidak pernah melibatkan para raja sebagai representasi kultural dalam pengambilan keputusan kebijakan. Kultur atau etnisitas dilihat sebagai ideologi perjuangan politik hanya saja etnisitas ternyata berperan lebih dari sekadar ideologi etnisitas malah justru memberi perasaan yang sangat mendalam.<sup>7</sup> Perjuangan eksistensi dari Kerajaan Islam yang berada di Kabupaten Fak-fak merupakan salah satu upaya untuk menjaga identitas kebudayaan yang bersifat turun temurun. Kekuatan etnis yang bisa dikonversikan ke arah konstetasi politik dan juga kecendrungan tentang adanya kemampuan etnis atau cara-cara (dari dalam) untuk memecahkan persoalan keagamaan sangat dibutuhkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup> Pengaruh peradaban Islam di Papua dan Papua barat merupakan bagian dari suatu rangkaian proses panjang perjalanan Islam di Nusantara selama lima belas abad hingga sekarang.<sup>9</sup>

Upaya-upaya para raja dalam pemenangan kandidat Mohamad Uswanas sebagai representasi kerajaan juga dilakukan dengan rencana yang rapi, melalui pembentukan tim keluarga kerajaan dalam proses konsolidasi, proses komunikasi dengan organisasi partai politik, dan juga mobilisasi masa saat proses pemilihan berlangsung merupakan sebuah upaya agar posisi eksistensi Kerajaan Islam bisa dikembalikan. Karena dengan mengusung calon yang berasal dari keluarga sendiri maka akan lebih mudah pula untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang lain. Sebab bagaimana pun dalam proses politik kepentingan yang mengangkat kebaikan bersama diperlukan, tetapi tidak bisa dilupakan pasti ada kepentingan-kepentingan lain yang ingin diwujudkan sebagai sebuah kelompok kepentingan. Kepentingan yang lain selain urusan kebudayaan juga pasti adalah kepentingan birokrasi karena bagaimana pun menurut Almond bahwa sebuah kelompok kepentingan jika bergerak secara politik pasti ada kepentingan untuk menduduki jabatan tertentu. Oleh karena itu bagaimana dan apa saja jabatan yang bisa didapat oleh Keluarga Kerajaan Islam dalam pemenangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fak-fak 2016 yang dimenangkan oleh kandidat yang didukung oleh para raja, yaitu Mohammad Uswanas dan Abraham

---

<sup>7</sup> Nordholt Schulte N dan Klinken Gerry. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009. Hal 29

<sup>8</sup> Saidin Ernas, Heru Nugoro, Zuly Qodir. 2014. "*Dinamika Integrasi Sosial di Papua Fenomena Masyarakat FakFak di Provinsi Papua Barat*", FISIP Universitas Gadjah Mada. KAWISTARA, Vol.4, No. 1

<sup>9</sup> Irfan Mahmud. 2012. "*Pengaruh Peradaban Islam di Papua*". Balai Arkeologi Jayapura Papua TH. Vol.IV, No. 2

Sophaheluwaken, sangat menarik untuk mengetahui perilaku sebuah kelompok dan perilaku sebuah elit ketika memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam sebuah lembaga pemerintahan, terutama pemerintahan di wilayah Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat yang mempunyai identitas kebudayaan Kerajaan Islam dalam kehidupan masyarakatnya.

### **Mengakomodir Kepentingan Keluarga Elite Kerajaan Islam**

Kemenangan yang diperoleh dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Fak-fak 2016, oleh kandidat yang didukung para raja tentu melibatkan peranan elit lokal yang mampu melakukan konsolidasi hingga mobilisasi untuk mendapatkan kemenangan. Dan disinilah peran para raja dan Bupati terpilih untuk mengkomunikasikan kepentingan yang telah disepakati bersama. Karena bagaimana pun seorang elit mempunyai beberapa tugas fungsi penting yang harus dilakukan; (1) menata hubungan antara kelompok kecil hingga sasaran kolektif dapat tercapai; (2) untuk menyatukan norma-norma ideal yang menentukan setiap kolektivitas dan ketergantungan hidup; (3) untuk melambungkan solidaritas dilakukan berbagai tata cara daada pertemuan<sup>10</sup>. Proses politik yang mengkomunikasikan antar elemen kelompok tentu berdampak pada kesepakatan politik begitu pula adanya dukungan dari raja-raja kerajaan Islam dalam konstetasi pemilihan kepala daerah juga berdampak pada kesepakatan politik yang dibuat untuk menyukseskan salah satu pasangan calon kepala daerah bisa terpilih menjadi Bupati di Kabupaten Fak-fak, diantara kontrak-kontrak yang dilakukan oleh raja dan juga pasangan kandidat terpilih terdapat kesepakatan yang didalamnya dimana adanya upaya dalam kesepakatan yang dilakukan oleh Bupati terpilih untuk mengakomodir keluarga kerajaan dalam birokrasi Fak-fak. Seperti Raja Pigpig Sekar yang menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja pasca pemilihan kepala daerah pilkada Kabupaten Fak-fak 2016.

Selain posisi diatas ada juga para raja dari Kerajaan Islam lainnya yang memperoleh posisi seperti: Raja Fatagar yang memperoleh posisi sebagai Kepala Dinas Perhubungan setelah proses politik pemenangan kandidat dari keluarga kerajaan Mohamad Uswanas. Selain posisi eksekutif juga ada posisi legislatif yang juga mendapatkan pengaruh dari keluarga kerajaan, dimana pengaruh dari legitimasi kerajaan juga dimanfaatkan oleh keluarga kerajaan sebagai representasi kelompok untuk duduk dalam kursi DPRD. Penguatan yang terjadi di kubu legislatif juga sangat berarti dalam mensukseskan mobilisasi yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Keller, Suzzan. 1995. *Penguasaan Kelompok Elite: Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. Hal 25

oleh 7 raja ini untuk mendukung kandidat kepala nomor urut 1 Mohammad Uswanas dan Abraham Sophaheluwaken menjadi kepala daerah di Kabupaten Fak-Fak. Dukungan dari para raja tersebut dari dalam legislatif ialah terpilihnya satu diantara 7 raja yang terpilih menjadi anggota legislatif dari Partai Golkar untuk periode 2014-2019 yaitu Abdul Ghani Bauw sebagai Raja Rumbati yang sudah pasti ikut juga membantu suksesnya dukungan para raja ini bukan saja dalam penggiringan massa, tapi juga sebagai pemberi informasi dari sistem-sistem yang terdapat diinternal DPRD itu sendiri yang berkemungkinan untuk mempersulit langkah gerak kandidat yang menjadi dukungan para raja tersebut.

Dengan runtutan yang ada perjuangan para raja tersebut dalam menduduki birokrasi merupakan upaya upaya yang sangat menentukan legitimasi keluarga kerajaan dimata masyarakat, melalui eksistensi program kebijakan yang akan dibuat dan tampilnya keluarga kerajaan dihadapan masyarakat. Peranan elite kerajaan dari bisa dilihat dalam unsur-unsur birokrasi Kabupaten Fak-Fak merupakan salah satu upaya agar posisi elit serta keluarga kerajaan dapat bertahan untuk mempertahankan eksistensi kebudayaan. Dimana upaya tersebut adalah untuk menjaga stabilitas dalam berjalannya pemerintahan karena bagaimana pun bila upaya tersebut dinihilkan maka akan berdampak pada pandangan masyarakat karena tidak dianggapnya posisi Kerajaan Islam dalam proses pembangunan wilayah Kabupaten Fak-Fak.

Dukungan para raja dari Kerajaan Islam tidak hanya diupayakan melewati akar rumput masyarakat yang ada di beberapa distrik melainkan melewati wilayah DPRD sebagai legislatif daerah. Banyak dari anggota DPRD Kabupaten Fak-fak dan juga partai politik yang berada di Kabupaten Fak-Fak sebagian besar masih berkeluarga dengan para raj-raja ini artinya bahwa didalam kubu DPRD maupun di kubu Partai politik yang Berada Kabupaten Fak-fak mayoritas masih berkeluarga dengan 7 raja ini. Dengan adanya hal seperti bisa di pastikan bahwa dengan terpilihnya kandidat kepala daerah nomor satu dan disamping itu komposisi keluarga kerajaan yang mendominasi DPRD dan juga partai politik jauh lebih mudah melihat kepentingan para raja ini mendukung salah satu kandidat kepala daerah Kabupaten Fak-fak untuk menghidupkan kembali eksistensi Kerajaan Islam yang berada di wilayah Fak-Fak. Di karena posisi Eksekutif dan legislatif yang diduduki oleh keluarga kerajaan dalam kontestasi merupakan sebuah panggung yang sangat strategis untuk mempertahankan legitimasi yang sebelumnya tidak ada pada keluarga kerajaan. Sekali lagi upaya kebaikan bersama dalam hal ini kebaikan menurut para raja sebagai elit kultural Kabupaten Fak-fak tidak hanya cukup dengan memenangkan kandidat saja melainkan juga harus melakukan upaya politik dengan menduduki posisi birokrasi eksekutif maupun legislative diperintahan.

Langkah yang dilakukan oleh raja dari Kerajaan Islam ini juga tidak terlepas dari pembelajaran sejarah yang pernah terjadi dalam proses pemenangan kandidat Bupati yang didukung oleh keluarga kerajaan malah menyingkirkan raja-raja Islam dalam berjalannya pemerintahan Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat sehingga para raja ini kehilangan eksistensinya.

### **Elit Kerajaan Islam dan Pemilihan Gubernur Papua Barat**

Posisi kemenangan yang berhasil diperoleh keluarga kerajaan tentu berdampak pada kepada kembalinya legitimasi masyarakat kepada elite adat yaitu para raja Kerajaan Islam. Bagaimana pun seorang elite pasti mereka tergantung dengan publik masyarakat begitu juga sebaliknya. Hubungan simbolis elite dengan pengikutnya dapat diamati lebih jelas pada kelompok-kelompok kecil yang mencakup interaksi langsung antara pemimpin dan yang dipimpin<sup>11</sup>. Oleh karena itu dengan adanya kemenangan yang diperoleh membuat para raja mempunyai kepercayaan diri untuk meluaskan pengaruhnya dalam perpolitikan di Provinsi Papua Barat. Kemenangan Mohammad Uswanas dan Abraham Sophaheluwaken merupakan modal tersendiri bagi keluarga kerajaan untuk memberikan pengaruh yang luas dalam proses politik setelah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Upaya mewujudkan kepentingan lewat perjuangan politik terus dilakukan sebagai upaya, Untuk menghidupkan kembali eksistensi Kerajaan islam di Kabupaten Fak-Fak dan Papua Barat. Dengan mempunyai pertimbangan cukup baik ketika seseorang bisa masuk kedalam sebuah sistem bukan saja kebijakan yang akan diatur tetapi pasti akan menemukan berbagai carai untuk menjaga dan melestarikan eksistensi Kerajaan islam.

Kekuatan para raja dalam mempengaruhi dan memobilisasi dukungan pada pemilihan kepala daerah kabupaten Fak-Fak terbukti ampuh dan dapat memenangkan kandidat kepala daerah nomor urut 1 dengan total suara 20.274. Dengan melihat keberhasilan ini para raja ini yang berjumlah 7 Kerajaan Islam ini mencoba peruntungan yang lain 7 raja ini dengan solid dan totalitas juga bermain dan juga ikut serta dalam proses-proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua Barat Periode 2017-2021 dengan mengarahkan dukungan kepada salah satu cagub dan cawagub. Dukungan yang diberikan para raja kepada salah satu cagub dan cawagub menggunakan cara yang sama ketika pemilihan kepala daerah di kabupaten Fak-Fak perbedaannya adalah dukungan para raja pada saat pilkada Fak-Fak kepada salah satu kandidat kepala daerah berbuah kemenangan sedangkan dukungan para raja

---

<sup>11</sup> Ibid, Hal 236

kepada salah satu kandidat cagub dan cawagub berbuah kekalahan. Raja-raja ini mendukung Full pasangan Cagub dan Cawagub nomor Urut 2 Irene Manibuiy dan Abdullah Mannaray yang disingan dengan Pasangan Iman. Tidak menutup kemungkinan para raja ini akan berperan kembali untuk melakukan proses-proses mobilisasi yang dimaksudkan untuk mendukung kembali salah satu kandidat di Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Barat Periode 2021-2025.

Keunggulan dalam perhitungan dari kandidat yang didukung oleh keluarga Kerajaan Islam di Kabupaten Fak-fak merupakan sebuah prestasi politik yang akan dikembangkan terus untuk melebarkan pengaruh kekuatan kerajaan yang mempunyai posisi miniroti dalam perpolitikan di Provinsi. Dalam proses berjalannya waktu saat ini para raja kembali menguatkan kemauannya untuk memberikan pengaruh untuk menghadapi kontestasi yang lebih jauh yaitu untuk menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2021 di Provinsi Papua Barat. Mempertahankan pengaruh dalam sebuah kontestasi merupakan sebuah perilaku kelompok yang memang menginginkan kelompoknya ingin terus mendapatkan pengakuan dan hal inilah yang membuat para selalu aktif dalam proses politik karena bila proses politik ditiadakan maka posisi Kerajaan Islam akan terancam kembali. Karena bagaimana pun posisi kelompok ini juga tidak hanya sebagai kelompok politik tetapi juga sebagai kelompok adat budaya yang sudah ada sejak lama. Walaupun tidak mempunyai pengaruh politik secara langsung, kesultanan dan kerajaan-kerajaan ini memiliki kekuatan simbolis yang cukup besar dalam pandangan masyarakat.<sup>12</sup>

## **Kesimpulan**

Dalam sebuah proses politik yang dilakukan oleh kelompok kepentingan pasti mempunyai tujuan yang berkaitan dengan kelompok ataupun berkaitan dengan individu didalamnya. Hal itu pula yang dilakukan oleh para raja dalam keikutsertaannya dalam proses kontestasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Fak-fak 2016 dengan memobilisasi dukungan. Upaya mobilisasi para raja dalam proses kontestasi tentu disebabkan oleh beberapa alasan yang menjadi penyebab mereka melakukan langkah politik. Posisi kekuatan para Kerajaan Islam yang menjadi identitas masyarakat Kabupaten Fak-fak sehingga kandidat yang didukung yaitu pasangan nomor urut 1 Mohammad Uswanas dan Abraham Sophaheluwaken mendapatkan kemenangan. Ada pula kemenangan yang diperjuangkan oleh

---

<sup>12</sup> Nils Bubandt. 2004. *Menuju Sebuah Politik Tradisi Yang Baru? Desentralisasi, Konflik, dan Adat di Wilayah Indonesia Timur*, University of Aarhus. Antropologi Indonesia. Hal 74

para raja dari Kerajaan Islam sebagai kelompok kepentingan juga bermuatan beberapa kepentingan, diantara kepentingan yang ingin diperoleh dalam proses kontestasi antara lain : pertama ingin menghidupkan kembali eksistensi Kerajaan Islam yang sebelumnya tidak terlihat, kedua kepentingan memasukan keluarga kerajaan ke birokrasi sebagai komitmen mengawal eksistensi kerajaan, dan yang ketiga Kerajaan Islam ingin menguatkan pengaruhnya dalam proses Pilgup 2017 dan 2021 di Provinsi Papua Barat. Dari proses timbal balik merupakan sebuah hal yang selalu terjadi bila sebuah kelompok kepentingan ikut serta dalam proses pemilihan yang digelar dalam sebuah Negara demokrasi.

## Daftar Pustaka

Almond, Gabriel. “*Comparative Politics Today; A world view*” *Interest and Articulation Interest Groups*

Davidson, Jamie S. 2010. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elite: Peran Elite-Penentuan dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kristianus. 2016. “*Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat*”, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1 (1) (2016) 87-101

Irfan Mahmud. 2012. “*Pengaruh Peradaban Islam di Papua*”. Balai Arkeologi Jayapura Papua TH. Vol.IV, No. 2

Nordholt Schulte N dan Klinken Gerry.2009. *Politik Lokal di Indoneseia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Nils Bubandt. 2004. “*Menuju Sebuah Politik Tradisi Yang Baru? Desentralisasi, Konflik, dan Adat di Wilayah Indonesia Timur*”, University of Aarhus. Antropologi Indonesia.

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Saidin Ernas, Heru Nugoro, Zuly Qodir. 2014. “*Dinamika Integrasi Sosial di Papua Fenomena Masyarakat FakFak di Provinsi Papua Barat*”, FISIP Universitas Gadjah Mada. KAWISTARA, Vol.4, No. 1